



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 540.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m²/80 m² di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah Seluas 7.862 m² di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m²/80 m² di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1.940 m² di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
5. Tanah Seluas 7.862 m² di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 204.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA D1A02N8M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA Y1G02N02L0 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



5. MOTOR, HONDA D1A02N8M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
6. MOTOR, HONDA Y1G02N02L0 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
7. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 VELOZ Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	764.000.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	614.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.